

KERJASAMA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II (STUDI KASUS SINERGI BAKAMLA, TNI DAN POLAIRUD)

Agus Fitriyanto¹, Wawan Budi Darmawan², Yusa Djuyandi³

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Koresponden E-Mail: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5500

Abstract

The Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI) is defined in three territorial divisions that connect two free waters. Ships and aircraft from other countries crossing Indonesian territory will cross the ALKI lane, and in maintaining national security and interests, extra supervision and security is necessary. The responsibility for security in the ALKI II area involves various agencies. So far, the condition of security implementation in the ALKI II area has not been in optimal condition because it is caused by several problems in this case communication and coordination which are often out of sync between personnel from authorized agencies. To overcome these problems, it is necessary to build a synergy between agencies. Synergy between agencies has a significant influence in increasing the optimization of the implementation of communication that exists between personnel from different agencies who are carrying out the task of securing the ALKI II area. This study contains the role of synergies between agencies and things that influence and problems in the implementation of security of ALKI II. This case study research model uses qualitative research methods. The results of the study concluded that the synergy between agencies had an important and strategic role in the implementation of the ALKI II Security Operation. The role of synergy between agencies has an impact on the success of the implementation of an activity. Synergy between agencies can also support national defense because it optimizes coordination so that the national defense strategy can be implemented properly. It also supports the preservation and protection of national sovereignty. There are several things that influence and problems in the synergy process between agencies.

Keywords: *Indonesian Archipelago Sea Route, Communication, Synergy, Coordination.*

Abstrak

Alur Laut Kepulauan Indonesia ditetapkan dalam tiga pembagian wilayah menghubungkan dua perairan bebas, kapal dan pesawat dari negara lain yang melintasi wilayah Indonesia akan melintasi jalur ALKI tersebut. Dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasional perlu dilakukan pengawasan dan keamanan yang ekstra. Tanggung jawab keamanan di wilayah ALKI II melibatkan berbagai instansi. Kondisi selama ini pelaksanaan pengamanan wilayah ALKI II belum berada dalam kondisi optimal karena disebabkan oleh beberapa masalah dalam hal ini komunikasi dan koordinasi yang sering tidak sinkron antara personel dari instansi berwenang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibangun sebuah sinergi antar instansi. Sinergi antar instansi memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan keoptimalan pelaksanaan

komunikasi yang terjalin antara personel yang berbeda instansi yang sedang melaksanakan tugas mengamankan wilayah ALKI II. Penelitian ini berisi tentang peran sinergi antar instansi dan hal yang berpengaruh serta permasalahan dalam pelaksanaan pengamanan ALKI II. Model penelitian studi kasus dengan pendekatan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian berkesimpulan sinergi antar instansi memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan Operasi Pengamanan ALKI II. Peran sinergi antar instansi memiliki dampak terhadap keberhasilan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sinergi antar instansi juga dapat mendukung pertahanan negara karena mengoptimalkan koordinasi yang dilakukan sehingga strategi pertahanan negara dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga mendukung terjaga dan terlindunginya kedaulatan nasional. Terdapat beberapa hal yang berpengaruh dan permasalahan dalam proses sinergi antar instansi.

Kata Kunci : Alur Laut Kepulauan Indonesia, Komunikasi, Sinergi, Koordinasi.

PENDAHULUAN

Negara kepulauan seperti Indonesia memiliki dimensi atas hak kedaulatan (*sovereignty*) wilayah daratan dan kedaulatan di wilayah perairan kepulauan (*archipelagic waters*). Dengan telah disahkannya hukum laut dari konvensi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Thn 1985 yang berisi bahwa segala yang berada di laut Indonesia, di dasar laut dan di bawahnya, berhak dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai sumber daya alam (Soedewo, 2015). Sehubungan dengan Undang-Undang tersebut juga berkaitan dengan pelayaran internasional yang melintasi laut Indonesia. Sepanjang sejarah, orang dan barang telah berpindah antar benua dan melintasi dunia melalui pelayaran laut. Pelayaran lalu-lintas di laut mencakup sebanyak 80%-90% dari perdagangan global, dengan perjalanan perdagangan sekitar lebih dari 10 miliar ton container kargo padat dan cair melintasi lautan dunia setiap tahun. Transportasi laut juga mencakup transportasi penumpang, militer dan pertahanan, aplikasi sumber daya perikanan atau kelautan, dan dukungan maritim seperti navigasi atau perawatan kapal. (Walker et al., 2019).

Transportasi laut merupakan bagian dari keseluruhan kluster kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan nilai tambah ekonomi. Lautan menyediakan arteri transportasi utama untuk perdagangan global. Sebagai moda transportasi utama untuk perdagangan global dengan pelayaran sekitar 90% barang yang diperdagangkan dibawa melalui laut, dengan demikian pelayaran laut mendatangkan banyak peluang dan tantangan serta tak terlepas dari potensi ancaman keamanan.

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ditetapkan dengan membagi jalur laut Indonesia dalam 3 (tiga) wilayah yaitu jalur ALKI I, jalur ALKI II dan jalur ALKI III serta memiliki cabang masing-masing. Jalur ALKI I memiliki cabang jalur ALKI I A dan jalur ALKI III memiliki cabang jalur ALKI III B, ALKI III C, ALKI III D dan ALKI III E. Pembagian wilayah ALKI terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002, tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia. ALKI dapat dimanfaatkan untuk pelayaran kapal asing maupun penerbangan pesawat asing diatas laut Indonesia. Wilayah ALKI menghubungkan dua samudra wilayah perairan bebas, yaitu Samudra Pasifik dibagian Utara dan Timur Indonesia dengan Samudra Hindia

dibagian Selatan dan Barat Indonesia. Penetapan pembagian wilayah ALKI bertujuan untuk tidak menghalangi lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional dan sesuai dengan perairan dan udara teritorial Indonesia dengan tetap dibawah pengamanan dan pengawasan oleh pihak-pihak dan saling berkordinasi antar instansi yang berwenang.

Wilayah jalur-jalur tersebut juga tidak luput dari berbagai potensi gangguan keamanan yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini ingin membahas salah satu wilayah ALKI yaitu jalur ALKI II. Dalam beberapa tahun kebelakang, pada jalur ALKI II terjadi beberapa kali terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah ini. Wilayah ALKI II memiliki berbagai potensi ancaman, seperti imbas dari politik ekspansional Malaysia dalam provokasi di wilayah Blok Ambalat, peristiwa mengklaim pulau Sipadan dan pulau Ligitan, serta imbas Bali yang sudah menjadi pusat pariwisata dunia yang berpotensi terjadi penyelundupan illegal, perdagangan manusia, bahkan dalam hal terorisme. Wilayah laut yang aman bagi Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi hal penting agar integrasi antar pulau dijamin tak mengalami gangguan. Meningkatnya kejahatan ekonomi seperti *illegal fishing* dan *smuggling* yang telah merugikan negara beberapa tahun terakhir ini adalah bentuk kejahatan ekonomi yang terjadi di perairan Indonesia yang mencerminkan ketidakamanan laut Indonesia. Untuk dapat mengatasi kejahatan ekonomi tersebut hanya dapat dihadapi dengan meningkatkan keamanan di laut. Karenanya diperlukan perhatian lebih dalam menjaga wilayah laut.

Dalam melakukan mengamankan di wilayah perairan ALKI II yang begitu luas dengan mempunyai berbagai

potensi permasalahan kompleks, dibutuhkan kesinergian antar instansi yang terlibat dalam pengamanan ALKI II. Kesenjangan sangat diperlukan dalam menjaga kewibawaan, marwah, dan martabat Indonesia sebagai negara kepulauan di mata dunia yang mampu dan efektif dalam hal mengamankan wilayah lautnya walaupun dinilai masih memiliki keterbatasannya. Untuk itu, menjaga keamanan dan kedaulatan nasional perlu dilakukan pengawasan dan keamanan yang ekstra. Terdapat 9 instansi atau Lembaga yang memegang tanggung jawab dalam penegakan hukum dan keamanan di wilayah ALKI II. Kesembilan instansi tersebut adalah TNI, POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Beacukai, Dirjen Imigrasi Kementerian Luar Negeri, BNPT, BNPP, dan BNPB.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya Harry Purwanto (2014) dengan judul "Rute Penerbangan di Atas Alur Laut Kepulauan: Perspektif Indonesia". Hasil penelitian menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, pemerintah Indonesia telah menentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan telah disetujui oleh *Internasional Maritime Organization* (IMO). Namun, belum disetujui oleh *Internasional Civil Aviation Organization* (ICAO) sejak Pemerintah Indonesia menyerahkannya. Richard M. Waas (2018) dengan judul "Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)". Hasil penelitian memaparkan bahwa sesuai dengan Hukum Nasional Indonesia maupun Hukum Internasional dan setelah ditetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan, status ALKI ditetapkan berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 pada pasal 46-

53. Selanjutnya Indonesia sebagai pemilik wilayah, sesuai dengan konvensi tersebut, dapat menetapkan pembagian jalur laut sebagai lalu-lintas bagi kapal dan pesawat dari negara lain yang ingin melakukan pelayaran atau penerbangan di atas wilayah laut dan teritorial Indonesia. Pranoto & Octavian (2015) dengan judul “Strategi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia”. Hasil penelitian ini mengatakan pola yang dapat dikembangkan untuk keefektifan dan efisiensi elemen judul adalah untuk melaksanakan operasi elemen laut berdasarkan pola posisi tunggu, dalam hal elemen laut bergerak ke arah ancaman yang datang diperoleh dengan mendeteksi elemen udara. Untuk mendukung kesiapan elemen kapal perang Indonesia dan melakukan pengamanan, jalur laut kepulauan Indonesia diorganisir sesuai dengan jadwal perawatan.

Banyaknya jumlah instansi yang memiliki Tanggung jawab keamanan di wilayah ALKI II sehingga berakibat terjadinya tumpang tindih kewenangan dan pelaksanaan penindakan. Wilayah ALKI II merupakan salah satu wilayah strategis dan memiliki tingkat kerawanan dari ancaman tradisional maupun non-tradisional. Sehingga diperlukan sebuah sistem komunikasi terpadu agar terjadi sinergi antar lembaga dalam menjalankan tugasnya di wilayah ALKI II. Integrasi komunikasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan keoptimalan pelaksanaan komunikasi yang terjalin antara personel yang berbeda matra yang sedang melaksanakan tugas mengamankan wilayah ALKI II. Dari sekian Lembaga yang terlibat dalam pengamanan ALKI II, hanya Bakamla, TNI dan Polairud yang memiliki satuan berkemampuan tempur. Dalam pengamanan ALKI II ketiga instansi memiliki pengaruh dan

wewenang yang besar serta bernilai strategis. Namun di lapangan terdapat beberapa permasalahan sehingga membutuhkan kerjasama antar ketiga instansi tersebut. Kerjasama dan sinergi yang baik antara Bakamla, TNI dan Polairud berpengaruh terhadap keoptimalan pengamanan. Komunikasi yang baik berdampak pada pelaksanaan koordinasi dalam operasi dan tugas pengamanan dan pengawasan wilayah ALKI II serta melindungi keamanan maupun kepentingan nasional.

Penelitian ini disusun dengan cara berikut. Bagian 2 berisi Tinjauan Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian diikuti oleh Bagian 3, yang menjelaskan Metode Penelitian. Pada bagian 4, hasil Penelitian dan pembahasan lebih lanjut. Terakhir, Bagian 5 menyimpulkan penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Keamanan Laut

Buzan (2009) mengklasifikasikan dua konsep keamanan, yakni konsep keamanan tradisional dan konsep keamanan non-tradisional. Salah satu kategori konsep keamanan tradisional adalah Keamanan laut. Disiplin ilmu *International Security studies* menjelaskan konsep keamanan secara tradisional ialah konsep yang memanfaatkan “*Use of Force*” dan dapat dikembangkan dengan “*States Use of Military Force*” yang berarti suatu negara memiliki potensi ancaman didominasi oleh negara lain dalam bentuk militeristik. Menurut Till (2001), Keamanan Laut masih terbilang baru dalam konteks pembahsan keamanan. Keamanan Laut seharusnya dapat studi lebih lanjut dalam konteks keamanan dengan perwujudan “*sea control*” dalam mewujudkan tujuan “*maintaining good order at sea*” dikarenakan belum optimalnya memanfaatkan potensi-

potensi saat mengeksplorasi laut (Till, 2001).

Setidaknya terdapat tiga tujuan dalam melakukan pembangunan dan pengembangan kekuatan laut di suatu negara, antara lain :

- a. Melakukan kontrol atas laut, setidaknya di daerah-daerah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Kontrol laut memberikan kebebasan bertindak yang diperlukan untuk mengejar tujuan negara, seperti perlindungan pelayaran, pengangkutan laut militer, dan blokade.
- b. Terciptanya keamanan laut dengan melindungi perdagangan lintas laut dan umumnya menjaga ketertiban di laut. Operasi termasuk counterpiracy, larangan obat, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum lainnya.
- c. Melakukan bantuan kemanusiaan seperti menanggapi bencana alam dengan bantuan medis, makanan, dan logistik dan keamanan.

Kekuatan Udara

Kardi (2000) berpendapat bahwa *Core Air Power Capabilities* (kemampuan inti kekuatan udara) terletak pada *Theory of Air Power* dan *Air Surveillance* atau kemampuan eksploitasi informasi (*information exploitation*). Eksploitasi atau pendayagunaan informasi tersebut meliputi: Bagaimana penggunaan *Air Power* untuk pengumpulan data-data melalui sistem pengamatan dan pengintaian udara, dan menterjemahkan data tersebut menjadi informasi yang berguna.

Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan menyatakan Teori Geopolitik dalam studi kelautan adalah "*Whoso ever commands the sea commands the trade; whoso ever commands the trade of the world commands the riches of the world and*

Air Power Theory, consequently the world itself", konsep ini menyatakan bahwa siapapun yang dapat mengendalikan wilayah laut maka akan mendominasi "perdagangan". Setelah mendominasi perdagangan sudah dapat dilakukan, selanjutnya mendapatkan "kekayaan dunia" sehingga pada akhirnya dapat "menguasai dunia". Sesuai dengan konsep modern yang mengatakan upaya penguasaan wilayah lautan harus dicapai melalui pembangunan *sea power* dan *air power* secara sinergis. Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki salah satu kemampuan modern dalam *air power* yaitu sudah dapat melakukan *air surveillance* melalui berbagai macam alat pendukung pertahanan negara. Dengan adanya keunggulan udara yang merupakan produk nyata dari kemampuan teknologi *air surveillance* TNI, maka keamanan wilayah ALKI dapat terjamin dari perspektif semua ancaman militer sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI (Seskoau, 2019).

Sistem Pertahanan Negara

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mendefinisikan Pertahanan Negara sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).

Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) berarti melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya, serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu kesatuan pertahanan negara,

kemudian dikelompokkan berdasarkan fungsi dan peran masing-masing ke dalam tiga komponen pertahanan negara, yaitu komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan semesta (Sishanta) adalah sistem pertahanan yang telah dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut oleh pemerintah untuk menangkal segala potensi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan warga negara.

Konsep Integrasi Komunikasi

Integrasi bersumber pada serapan bahasa Inggris “*to integrate*” dijabarkan “*join to something else so as to form a whole; to join in society as a whole*”, diartikan dalam bahasa Indonesia yang artinya “untuk menjadi suatu bentuk dalam keseluruhan”. Jadi, arti integrasi adalah usaha mempersatukan dua atau lebih hal-hal berbeda untuk mencapai kesatuan yang utuh. Beberapa ahli telah menjelaskan definisi dari integrasi, Poerwadarminta (1982) mengatakan bahwa integrasi adalah penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh. Rais (2012) berpendapat integrasi mengandung arti pembauran sehingga menjadi sesuatu yang utuh, satu, dan bulat.

Komunikasi bersumber pada bahasa Latin yakni “*communicatus*” yang artinya saling memberi untuk menjadi milik bersama. Jika dua orang berkomunikasi, keduanya menginginkan pesan yang disampaikan menjadi pemahaman bersama. Beberapa ahli telah menjelaskan definisi dari komunikasi, Hovland & Kelley mengatakan komunikasi adalah suatu kegiatan berisikan pertukaran pesan verbal dari satu arah dalam mempengaruhi orang lain (Ardianto, 2011). Lebih lanjut Suprpto (2011)

menjelaskan komunikasi publik ialah aktivitas menyapaikan pesan informasi, dan ide terhadap khalayak ramai dapat menggunakan saran pembantu berupa mesin atau media elektronik seperti televisi, radio, televisi, bahkan melalui film, dan media cetak seperti koran dan majalah sehingga tersampaikan ke banyak orang.

Namun selain sebagai aktivitas menyapaian pesan atau informasi, pemberi pesan dalam melakukan komunikasi kepada penerima pesan dapat mengalami berbagai hambatan yang biasanya ditemui saat berkomunikasi (Ruslan 2008), seperti : *Sender Barries* (Hambatan Dalam Proses Penyampaian); *Phsysical Barries* (Hambatan secara Fisik); *Sychossial Noies* (Hambatan Sosial); dan *Hambatan Pers* (Semantik Pers).

Teori Peranan dan Pengaruh

Peranan adalah bagian dinamis pada suatu kedudukan. Dalam Peranan, diperoleh dengan terlebih dahulu melakukan kewajiban berdasarkan tingkat kedudukan. Tidak ada kedudukan tanpa peranan serta tidak ada peranan tanpa kedudukan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena saling tergantung satusama lain. Setiap manusia memiliki berbagai macam peranan sesuai dengan pola kehidupannya masing-masing. Peranan menentukan perilaku seseorang di dalam masyarakat dan masyarakat memberikan berbagai kesempatan-kesempatan kepada seseorang untuk memilih perannya (Soekanto, 2012).

Lebih lanjut, Berry (2003) menjelaskan peranan ialah harapan-harapan individu dalam kedudukan sosial yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya. Harapan-harapan tersebut berasal dari aturan norma-norma pada masyarakat. Terdapat dua harapan yang

dimaksud dalam menjalankan peranan yakni harapan dari seseorang yang telah menjalankan perannya terhadap masyarakat dan harapan masyarakat kepada orang yang menjalankan peranannya (Berry, 2003).

Selanjutnya, Pengaruh dalam KBBI memiliki arti daya yang muncul dari sesuatu (orang maupun benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dalam pengertian lain, pengaruh adalah kekuatan yang timbul dari suatu benda atau orang dan juga gejala alam yang dapat memberikan perubahan pada sekelilingnya (Surakhmad, 2016). Jadi, pengaruh adalah hasil dari sikap yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dikarenakan telah melaksanakan kewajibannya terhadap pihak memintanya untuk menjalankan kewajiban tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Landasan teori digunakan sebagai acuan umum dan bahan pembahasan untuk analisis hasil penelitian. Penelitian kualitatif dimulai dengan menumpulkan data, menggunakan landasan teori yang relevan terhadap pembahsan penelitian, dan diakhiri dengan menarik suatu kesimpulan teori (Moleong, 2014) Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Desain studi kasus dimulai melalui kegiatan pengamatan dan pemeriksaan secara detail pada suatu keadaan yang disebut sebagai kasus dengan melakukan pengumpulan data yang sistematis, dilanjutkan dengan menganalisis informasi dari data penelitian, membuat pelaporan hasil penelitian, dan yang terakhir membuat kesimpulan penelitian.

Subjek penelitian pada penelitian ini merupakan informan yang menjadi

sumber data penelitian yaitu lembaga-lembaga pengamanan wilayah ALKI II. Objek penelitian adalah permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian yaitu kerjasama pengamanan. Subjek penelitian atau informan adalah personel Bakamla, personel TNI dan personel Polairud yang bertindak sebagai penghubung komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam Operasi Pengamanan ALKI II. Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa sumber, menggunakan dokumen yang terkait dengan kerjasama antar lembaga dalam operasi pengamanan ALKI II. Observasi dilakukan dengan mendatangi lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengamanan wilayah ALKI II. Wawancara dilakukan terhadap informan yang sudah dipilih dan terlibat dalam pengamanan wilayah ALKI II.

Pada penelitian ini menggunakan tiga tahap analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah telah melakukan pengumpulan data penelitian dan di rasa sudah cukup, peneliti melakukan reduksi data pada data yang telah dikumpulkan. Kemudian melakukan penyajian data dengan mengumpulkan data yang telah direduksi sebelumnya menjadi data terorganisasikan sehingga dapat mempermudah untuk dipahami dan memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan awal dan pengambilan tindakan. Terakhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan secara terus-menerus mencoba menyimpulkan penelitian sesuai dengan serangkaian data yang sudah disajikan selama berada di lapangan. Saat pengumpulan data, peneliti mulai mencatat keteraturan pola-pola (dalam kaitannya dengan landasan teori), konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, penjelasan alur sebab akibat, dan proposisi kesesuaian teori. Kesimpulan dibuat secara mendalam

namun tetap bersifat skeptis dan tetap terbuka tetapi sudah harus tersedia sebagai kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam operasi pengawasan dan pengamanan di wilayah ALKI II, TNI menggunakan sarana dan prasarana dari tiga matra angkatan berupa Alutsista pesawat dan kapal serta komponen pendukung berupa sistem radar dan peralatan komunikasi. Seluruh perlengkapan tersebut diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamanan TNI di wilayah ALKI. Bakamla memiliki peran sebagai *coast guard* dengan mengetahui segala seluk beluk wilayah laut Indonesia dan berwenang mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia khususnya pada jalur ALKI II. Korpolaairud dalam rangka pemeliharaan keamanan laut melakukan patroli terutama di titik perbatasan, melakukan penindakan kejahatan seperti *illegal fishing*, penggunaan bahan peledak, penyeludupan tenaga kerja Indonesia dan pengiriman pekerja imigran yang terjadi di perairan Indonesia khususnya di wilayah ALKI II.

Pengamanan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II

Secara disahkan pembagian wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang ditetapkan di tengah Indonesia, membagi sisi Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, melintasi Selat Makassar sampai Selat Lombok. Jalur ALKI II memiliki nilai strategis dan potensial karena menjadi jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Dengan semakin padatnya transportasi lalu lintas pelayaran yang melintasi Selat Malaka dan beberapa tahun belakang telah terjadi

pendangkalan di jalur tersebut, kapal cargo dan tangka yang ingin melintas memutuskan merubah jalur pelayarannya dengan melintasi jalur ALKI II sebagai jalur pendukung lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional. Adisasmita (2008) mengemukakan “Kawasan Pembangunan SEMEJA” sebagai konsep yang mengatakan bahwa jalur ALKI II selain merupakan alur laut dalam yang ekonomis dan aman untuk dilintasi, jalur ALKI II di masa mendatang dapat menjadi wilayah kunci karena terdapat jalur dari Selat Lombok menuju ke Selat Makassar ataupun sebaliknya dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Konsep tersebut dibangun berdasarkan jika garis jalur pelayaran dunia ditarik secara horizontal dan vertikal pada bola dunia maka irisan garis tersebut bertemu pada titik lokasi di Selat Makassar.

Pemerintah Indonesia mendapatkan konsekuensi langsung untuk menjamin keamanan dari segala bentuk ancaman dari penetapan wilayah jalur ALKI untuk banyaknya kapal dan pesawat dari negara lain yang sedang menggunakan jalur lalu lintas ALKI terutama ancaman bagi kondisi keamanan dan kedaulatan negara. Hal tersebut sudah menjadi tugas utama Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan kedaulatan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Bagian Kedua Fungsi Pasal 6 menjelaskan TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Pemerintah Indonesia juga menjalin kerjasama antar negara sebagai upaya pengamanan dan pengawasan

wilayah laut khususnya pada perairan laut Sulu yang menjadi salah satu jalur masuk ke wilayah ALKI II. Kerjasama itu dibangun dengan negara tetangga yang juga berbatasan langsung di laut Sulu, yakni Malaysia dan Filipina. Perjanjian kerjasama ini terbukti dapat menangkal dan menurunkan tingkat kejahatan di laut. Baru-baru ini telah dilaksanakan *Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)* Indomalphi Ministerial Meeting Tahun 2022 mempertemukan Menteri Pertahanan masing-masing negara sebagai hubungan erat yang telah terjalin lama dan komitmen yang kuat ketiga negara yang diresmikan sejak tahun 2016. Pertemuan tersebut antara lain membahas upaya meningkatkan kehadiran ketiga negara di perairan kawasan yang meliputi pelaksanaan latihan maritim trilateral, pertukaran informasi, pemantauan, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan laut dan udara secara efektif untuk memperkuat *show of force* gabungan serta yang menjadi perhatian bersama dalam mencegah ancaman keamanan di kawasan laut tersebut.

Pengamanan dan pengawasan wilayah jalur ALKI II perlu mendapat perhatian mengingat strategisnya jalur ini. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan personel dan peralatan yang dimiliki TNI maupun koordinasi keamanan laut yang efektif antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam operasi pengamanan dan pengawasan wilayah ALKI II. Selanjutnya dengan konsisten menjalankan paradigma *maritime/sea-based development*, bukan lagi menganut paradigma *continental-based development*, dengan pemanfaatan jalur ALKI II menuju ke arah pembangunan dan peningkatan ekonomi di kawasan pesisir dapat terwujud dengan semakin

rendahnya tingkat kejahatan di laut wilayah ALKI II.

Operasi pengawasan dan pengamanan wilayah ALKI II menjadi hal penting untuk memperkuat kembali wacana Indonesia sebagai negara maritim. Potensi ALKI II yang belum tergali secara ekonomi dapat berarti bahwa keadaan pertahanan Indonesia di wilayah laut masih lemah. Keamanan di wilayah laut sangat penting karena laut Indonesia merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Menjaga wilayah ALKI II juga tidak terlepas dari pengamanan kedaulatan negara. Hal-hal yang dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan pengamanan di wilayah ALKI II yaitu menambah kekuatan armada atau pasukan di wilayah laut Indonesia seperti mengembangkan instalasi kapal laut, kepatuhan, pengawasan, prosedur keselamatan dan peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan pasukan.

Tidak hanya dalam mempertahankan kedaulatan, Operasi pengawasan dan pengamanan wilayah ALKI II juga dilakukan untuk kapal perdagangan internasional dalam jaminan keamanan saat melintasi perairan Indonesia. Menurut peneliti, dengan kondisi wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak selat strategis dalam pelayaran dan perdagangan internasional, hal tersebut menimbulkan kesadaran bahwa terlihat kejanggalan pada pengambilan kebijakan pertahanan yang selama ini terlalu berorientasi pada penguatan sistem militer di darat saja namun mengabaikan pembangunan postur kebijakan pertahanan di wilayah laut.

Kondisi Sinergi Antara Bakamla, TNI dan Polairud Dalam Pelaksanaan Pengamanan Wilayah ALKI II.

Terkait dengan pengumpulan data yang dilakukan terhadap beberapa

narasumber, didapatkan bahwa dalam kerjasama antara TNI, Bakamla dan Polairud selama ini belum maksimal maupun pelaksanaan dilapangan. Koordinasi yang terjalin antara TNI, Bakamla dan Polairud dalam melaksanakan tugas di ALKI II sudah baik. Instansi-instansi tersebut melaksanakan tugas dan kewenangan dan menjalankan peran masing-masing sebagai upaya mencegah berbagai tindak pelanggaran hukum dan kriminal laut yang terjadi di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia khususnya ALKI II.

Instansi-instansi tersebut telah melakukan beberapa upaya dalam hal menjaga wilayah ALKI II. Bakamla yang berencana membangun pangkalan armada di Kabupaten Gorontalo Utara. Rencana tersebut bertujuan untuk mengamankan wilayah perairan Gorontalo Utara. Alasan pentingnya rencana pembangunan pangkalan di wilayah Gorontalo Utara karena wilayah strategis tersebut berbatasan langsung dengan Filipina dengan memiliki potensi rawannya penyelundupan senjata api dan bahan peledak serta perdagangan manusia. Nantinya pembangunan pangkalan baru ini dapat memangkas waktu armada patroli satuan Bakamla saat bereaksi terhadap suatu pelanggaran di laut dalam wilayah ALKI II.

TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara secara rutin melakukan patroli rutin dan menggelar latihan bersama antar matra di wilayah perbatasan khususnya ALKI II. Latihan kerjasama taktis di wilayah ALKI II pernah dilakukan TNI AL dengan KRI I Gusti Ngorah Rai (GNR)-332 Gugus tempur laut (Guspurla) Koarmada II bersama TNI AU dengan dua pesawat Sukhoi 27/30 dari Skadron udara 11 Makassar. Kegiatan tersebut berisi berbagai macam materi latihan diantaranya latihan peperangan anti udara oleh KRI GNR-332 dan simulasi

serangan langsung berupa penembakan dari udara oleh pesawat Sukhoi 27/30. Latihan militer dilakukan sebagai bentuk keseriusan TNI dan terjalin kerja sama yang baik secara taktis antara dua matra dalam rangka melaksanakan Operasi Gabungan TNI untuk menjaga kedaulatan negara khususnya pada wilayah ALKI II.

Korpolairud Polri sebagai pimpinan dari Direktorat Polairud Polda Sulut telah memberikan bantuan penambahan 4 buah kapal baru untuk memaksimalkan tugas pengawasan dan pengamanan di wilayah laut Sulawesi Utara yang termasuk dalam jalur ALKI II. Hal tersebut selain untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamanan, juga merupakan wujud representasi negara pada setiap wilayah Indonesia yang membutuhkan kehadiran Polri dalam penegakan kriminalitas. Korpolairud rutin melaksanakan patroli dan latihan di wilayah laut Sulawesi Utara mengingat wilayah laut yang secara geografis berbatasan laut dengan negara Filipina di sebelah utara dan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak pulau dan laut yang luas serta daerah rawan penyelundupan dan pemasukan barang ilegal.

Kerja sama yang terjalin antara Bakamla, TNI AL, TNI AU, dan Polairud dalam melaksanakan tugas saat ini sudah berjalan baik dengan melaksanakan pertukaran informasi, patroli terkoordinasi, dan latihan bersama.

Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Sinergi Antar Instansi Selama Pengamanan Wilayah ALKI II.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data, peneliti memperoleh faktor-faktor yang berpengaruh pada proses Sinergi Integrasi antar instansi

dalam pengawasan dan pengamanan wilayah ALKI II, antara lain:

- a. Adanya faktor komunikasi efektif antara Polairud dengan instansi terkait dengan diadakannya kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaboratif baik dalam bidang patroli perairan maupun kegiatan lainnya.
- b. Penggunaan fasilitas dan peralatan yang ada di masing-masing Instansi dapat mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum;
- c. Sinergitas yang baik antar stakeholder yang bertugas di ALKI II;
- d. Ketersediaan fasilitas lebih, fasilitas Harkan dan Fasilitas Bekul di sekitar wilayah ALKI II.
- e. Pertukaran informasi melalui puskodal Bakamla dan puskodal yang dimiliki instansi lain berjalan dengan baik sehingga maritime picture cimpilation dapat dimonitor oleh masing-masing stakeholder dengan cepat.

Peran dan Pengaruh Sinergi Bakamla, TNI dan Polairud dalam Pengamanan ALKI II.

Peran sinergi antar instansi dalam pengawasan dan pengamanan ALKI II berpengaruh pada sistem komunikasi yang ada. Peran sinergi antar instansi dalam pertahanan negara secara langsung sesuai dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek), yang mana telah diuraikan bahwa strategi pertahanan negara adalah mencegah, menangkal dan mengatasi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sinergi antar instansi mampu meningkatkan dan memaksimalkan koordinasi serta membangun satu kesatuan seluruh unsur-unsur TNI, Bakamla dan Polairud yang terlibat sehingga dukungan terhadap Operasi Pengamanan ALKI II dapat berjalan

secara optimal dan Operasi tersebut dapat berjalan dengan sukses.

Integrasi komunikasi perlu didukung penuh oleh Kekuatan Udara karena suatu hal yang bernilai strategis dalam pengawasan dan pengamanan wilayah ALKI II. Sesuai dengan teori Kekuatan Udara (*Air Power*) menjelaskan keunggulan udara merupakan faktor utama dalam menjamin kemenangan. Untuk itu harus dipertimbangkan kedepannya kemungkinan potensi-potensi ancaman baru yang dapat dideteksi dan diatasi melalui wahana udara. Oleh karena itu perlu dipikirkan kebijakan strategis untuk menguasai, mengamankan, dan mempertahankan keunggulan udara di atas wilayah ALKI II. Dengan adanya keunggulan udara yang merupakan produk nyata dari kemampuan teknologi *air surveillance* TNI, maka keamanan wilayah ALKI II dapat terjamin dari perspektif semua ancaman militer sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI.

Dalam kaitan pembahasan kemampuan interoperabilitas teknologi *air surveillance* TNI dalam upaya menjaga keamanan dan menegakkan kedaulatan udara di wilayah ALKI II. Operasi Pengamanan ALKI II adalah pengamanan wilayah laut dan udara Indonesia. Pelaksanaan keamanan maritim sangat bertumpu pada komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh unsur-unsur pelaksana. Integrasi komunikasi memiliki peranan untuk mengatasi dan meningkatkan sehingga pelaksanaan keamanan maritim dapat mencapai kondisi optimal.

Kardi (2000) berpendapat bahwa pada *Theory of Air Power, Air Surveillance* merupakan bagian dari kemampuan inti *Air Power (Core Air Power Capabilities)* yang disebut

dengan kemampuan melakukan *Information Exploitation*. Dengan mengoptimalkan kemampuan teknologi *air surveillance* TNI maka penguasaan wilayah lautan untuk keamanan di dalam wilayah ALKI II dapat ditingkatkan, sehingga tegaknya kedaulatan NKRI di wilayah ALKI dapat terwujud. Dengan kondisi ALKI II yang merupakan salah satu jalur penting dan strategis bagi penerbangan dan pelayaran baik domestik maupun internasional sehingga keamanan di dalam wilayah ALKI II harus dapat terwujud. Integrasi komunikasi memiliki peran utama dalam memberikan dukungan untuk mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data, peneliti memperoleh Sinergi Integrasi antar instansi memiliki tujuan untuk menyatukan sistem komunikasi secara terpadu pada seluruh satuan yang terlibat dalam operasi. Sesuai dengan pendapat Poerwadarminta (1982) dan Rais (2012) tentang teori Integrasi yang berarti upaya penyatuan berbagai hal sehingga terjadi pembauran sehingga menjadi sesuatu suatu kebulatan yang utuh. Berdasarkan teori tersebut, peneliti berkesimpulan Sinergi Integrasi ini dapat menyatukan sistem komunikasi dalam satu lingkup secara keseluruhan sehingga berdampak pada lancarnya komunikasi yang dijalankan. Dari hasil wawancara dan pengumpulan data, Sinergi Integrasi antar instansi yang bertugas melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah ALKI II sudah dilakukan upaya menyatukan dan mensinkronisasi koordinasi antar satuan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa Sinergi Integrasi antar instansi yang menyatukan secara utuh berpengaruh pada proses dan sistem komunikasi yang dilaksanakan selama pengawasan dan pengamanan wilayah ALKI II. Sehingga terwujudnya Sinergi Integrasi antar instansi memiliki pengaruh terhadap

komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan operasi pengawasan dan pengamanan wilayah ALKI II.

Kendala Dalam Proses Sinergi Bakamla, TNI dan Polairud Dalam Pelaksanaan Pengamanan ALKI II

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data, peneliti menemukan beberapa kendala dalam proses sinergi antar instansi dalam pelaksanaan pengamanan ALKI II adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya peraturan Undang-Undang yang dimiliki masing-masing Instansi penegak hukum di bidang kelautan, sehingga dapat terjadi *miss* komunikasi antar Instansi yang bertugas;
- b. Terjadinya *overlapping* dalam penegakkan hukum di laut karena banyaknya Instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum di laut khususnya ALKI II.
- c. Kurangnya koordinasi antar unsur operasional di lapangan;
- d. Ego sektoral masing-masing *stakeholder*;
- e. Kendala yang dihadapi bakamla ialah keterbatasan gelar unsur operasi yang tersedia.

Kendala terkait dengan komunikasi selama ini adalah tidak adanya sebuah pusat komando dan kendali yang mejadi penghubung antar instansi. Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan hambatan-hambatan komunikasi dapat diatasi dengan adanya penghubung komunikasi yang terpusat sehingga berdampak juga pada koordinasi yang terjadi dalam pengamanan ALKI II. Penyebab utama komunikasi tidak berjalan dengan baik adalah komunikasi yang selama ini terjalin hanyalah bersifat internal. Komunikasi yang dijalankan secara eksternal jarang dilaksanakan.

Adanya tumpang tindih terutama terkait dengan kebijakan wewenang penindakan sehingga menjadi kendala dalam penindakan khususnya penindakan yang harus dilakukan secara cepat. Kondisi keamanan di ALKI II yang begitu rawan karena merupakan wilayah strategis dan merupakan perlintasan internasional menjadikan setiap instansi berlomba-lomba melakukan penindakan hal ini juga memacu terjadinya ego sektoral. Salah satunya adalah tumpang tindih kewenangan untuk penindakan pelanggaran di wilayah lautan. Berbeda dengan pelanggaran wilayah udara yang mana hanya TNI Angkatan Udara yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan penindakan.

Penetapan pembagian wilayah ALKI selain membawa segudang manfaat di masa mendatang yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, perairan ALKI II juga memiliki konsekuensi bagi Indonesia yakni banyaknya potensi permasalahan yang harus selalu siap diantisipasi. Pemerintah perlu terus mendorong stakeholder- stakeholder keamanan maritim untuk saling bersinergi dan menghilangkan ego sektoral semata-mata bersatu untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi penggunaan kekuatan keamanan maritim demi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan menjadi poros maritim dunia dalam wilayah lautnya.

Pada Wilayah Laut terdapat beberapa instansi yang berwenang terdapat Bakamla, Polairud dan TNI Angkatan Laut. Tumpang tindih kebijakan ini menyebabkan adanya persaingan antar instansi. Hal ini berdampak pada adanya anggapan bahwa terdapat instansi yang diutamakan dan instansi lainnya dipinggirkan. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada optimalnya

penindakan yang dilakukan di wilayah laut. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini perlu adanya sebuah peraturan khusus atau petunjuk teknis yang membahas tugas dan wewenang serta mencakup seluruh instansi dalam melakukan tugas pengamanan dan pengawasan di wilayah ALKI II. Peraturan khusus atau petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan dapat mempercepat proses komunikasi serta koordinasi dalam operasi pengamanan dan pengawasan di wilayah ALKI II sehingga meniadakan terjadinya tumpang tindih kewenangan kebijakan.

KESIMPULAN

Dari hasil paparan penelitian yang telah disampaikan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disusun sebagai berikut:

- a. Sinergi antar instansi memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan Operasi Pengamanan ALKI II.
- b. Kondisi sinergi antar instansi memiliki dampak yang cukup besar terhadap keberhasilan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sinergi antar instansi juga dapat mendukung pertahanan negara karena mengoptimalkan koordinasi yang dilakukan sehingga strategi pertahanan negara dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga mendukung terjaga dan terlindunginya kedaulatan nasional.
- c. Terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap sinergi antar instansi.
- d. Dalam proses sinergi instansi tersebut terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang ditemui.

Saran

Saran-saran dalam penelitian ini adalah sinergi antar instansi memerlukan

dukungan komando atas dari masing-masing instansi dalam mendukung penerapan sinergi antar instansi baik pada saat operasi gabungan maupun operasi yang hanya melibatkan satuan yang berada di bawah komando satu instansi. Sinergi antar instansi juga membutuhkan dukungan peralatan komunikasi yang memiliki teknologi canggih untuk mengatasi kendala-kendala yang seringkali muncul pada saat melaksanakan suatu kegiatan, misi ataupun operasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, K., & Djam'an, S. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Adisasmita, Rahardjo. (2008). *Kawasan Pembangunan SEMEJA*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Berry, D. (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buzan, B., & Lene, H., (2009). *The Evolution Of International Security*. Newyork:Cambridge University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Harun, R., & Ardianto, E. (2011). *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Domain, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Rajawali Pers.
- Kardi, K. (2000). *Air Power Kekuatan Udara Edisi Pertama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (United Nations Convention on The Law of The Sea) Tahun 1982.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002, tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia.
- Poerwadarminta. (1982). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pranoto, H., & Octavian, A. (2015). Analysis of Security Strategy at Indonesia Archipelagic Sea Lane. *Jurnal Pertahanan ISSN, 2087, 9415*.
- Purwanto, H. (2014). Rute Penerbangan di atas Alur Laut Kepulauan; Perspektif Indonesia. *Perspektif Hukum, 14(1), 1-17*.
- Rais, H. (2012). *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruslan, R. (2008). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sekkau. (2015). *Buku 2A Latihan Olah Yudha*. Jakarta: Lamp.O
- Seskoau. (2019). *Teori Air Power*. Bandung
- Soedewo, A. (2015). *Pemberlakuan Ketentuan Bagi Kapal Berbendera Asing Untuk Melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Ditinjau Dari Perspektif Hukum Negara Indonesia dan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suprpto, T. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi dan Peran Manajemen Dalam Komunikasi*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Surakhmad, W. (2016). *Pengantar pendidikan ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Till, G. (2001). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. London: Department of King's College

- Waas, R. M. (2016). Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *Sasi*, 22(1), 22-36.
- Walker, T. R., & Schnurr, R. E. (2019). Marine transportation and energy use. *Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences*; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional
- Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.